

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

1.1 Analisis Dampak ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU pada DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan

Seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini masih terjadi ketegangan politik antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketegangan politik antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang bisa saja menimbulkan dampak bagi keduanya, misalnya:

1. Kegelisahan dan kebingungan warga *nahdliyin*. Perseteruan PBNU dan PKB menciptakan kegelisahan dan kebingungan di kalangan warga *nahdliyin* di berbagai daerah.
2. Merugikan kedua pihak. Konflik ini disebut-sebut merugikan PBNU dan PKB sendiri, baik dalam hal citra maupun dukungan dari masyarakat.
3. Pencemaran citra. Konflik ini turut mencemari citra PBNU dan PKB di mata publik, yang dapat berdampak pada hubungan keduanya di masa depan.
4. Perpecahan internal. Konflik ini juga dapat memicu perpecahan internal di dalam tubuh PBNU dan PKB, serta memicu perselisihan antar pengurus dan anggota.
5. Hilangnya kepercayaan. Ketegangan ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PBNU dan PKB, terutama jika konflik terus berlanjut dan tidak diselesaikan dengan baik.

Melihat ketegangan politik antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori Konflik Sosial dari Lewis A. Coser yang menawarkan pandangan bagaimana ketegangan antara PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dapat dipahami dalam konteks hubungan antara kepentingan politik dan keagamaan yang sering kali bertentangan (Adnan 2021). Dalam hubungan historis antara PBNU dan PKB, keduanya memiliki akar yang sama, di mana PKB awalnya didirikan untuk menjadi wadah politik yang merepresentasikan aspirasi warga *nahdliyin*. Namun, seiring waktu, perbedaan kepentingan antara PBNU sebagai organisasi keagamaan dan PKB sebagai partai politik semakin tampak, terutama dalam cara kedua entitas ini melihat peran mereka di masyarakat.

Coser berpendapat bahwa konflik sosial sering kali timbul karena manusia yang saling berinteraksi di mana dapat timbul unsur permusuhan sehingga terjadi konflik. Dalam konteks PBNU dan PKB, ketegangan ini muncul karena pernyataan-pernyataan Gus Yahya dan Cak Imin yang seringkali bersinggungan. Seperti Ketika Gus Yahya menyatakan bahwa PKB bukan partai NU karena dari hasil Muktamar NU mengambil jarak dari polititik praktis sedangkan Cak Imin merespons santai bahwa PKB memang bukan bagian dari NU. Selain itu, Sekretaris Jendral PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menyatakan bahwa PBNU membentuk Tim Lima karena menganggap PKB sudah menyimpang, Gus Ipul menuding ada upaya yang dilakukan elite PKB

untuk menjauhkan PKB dari NU, Gus Ipul selalu mengingatkan tanpa bantuan NU, PKB tidak akan terbentuk, beberapa jam setelah PBNU merilis pernyataan akan membuat Tim Lima untuk Kembali merebut PKB, Cak Imin dalam pembekalan kepada seluruh anggota legislatif PKB dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau merespon tudingan Gus Ipul dengan menyatakan bahwa PKB tidak hanya untuk kalangan NU, PKB didirikan Gusdur untuk seluruh bangsa Indonesia. Interaksi yang terjadi antara Gus Yahya dan Cak Imin ini akhirnya menimbulkan ketegangan.

PBNU yang menyatakan cenderung menjaga jarak dari politik praktis untuk mempertahankan otonomi keagamaan dan integritas moralnya, sedangkan PKB, sebagai partai politik, membutuhkan fleksibilitas dalam bernegosiasi dan menjalankan strategi politik demi kepentingan elektoral menciptakan ketegangan yang signifikan antara kedua entitas, terutama ketika PKB dianggap terlalu memanfaatkan basis keagamaan NU untuk tujuan politiknya.

Konflik ini juga bisa dilihat dari perspektif *vested interest* atau kepentingan terikat. Pemimpin PBNU dan PKB memiliki kepentingan yang berbeda dalam mempertahankan posisi dan pengaruh mereka seperti dalam konteks pemilihan presiden 2024. PBNU merasa bahwa PKB memutuskan hubungan dengan PBNU karena tidak melakukan *sowan* dalam keputusan penting pencalonan Cak Imin sebagai Calon Wakil Presiden sehingga sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar jajaran PBNU mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Griban Rakabuming Raka pada pilpres 2024

sedangkan PKB mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada Pilpres ini PKB merasa perlu mendapatkan dukungan dari basis massa NU guna mempertahankan keberhasilan politiknya, namun karena tidak adanya koordinasi dengan PBNU, PKB justru kalah dalam Pilpres.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari ketegangan politik antara DPP PKB dengan PBNU pada hubungan politik antara DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari tokoh DPC PKB dan tokoh PCNU di Kabupaten Pekalongan. Para tokoh dari DPC PKB dan tokoh PCNU di Kabupaten Pekalongan justru menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari ketegangan politik antara DPP PKB dengan PBNU pada hubungan politik DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan analisis, hal ini disebabkan karena hubungan antara DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan terjalin erat dan terjadi hubungan politik kolaborasi, yaitu hubungan politik untuk mencapai satu tujuan sama dan saling menguntungkan.

Politik kolaborasi dalam pemilihan legislatif mengacu pada kerjasama dan ketergantungan mutual antara partai politik dan elite lokal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tokoh-tokoh PCNU merasakan dampak positif dari terpilihnya anggota legislatif dari PKB, dan PKB membutuhkan NU sebagai basis suara terbesar untuk kemenangan PKB itu sendiri. Hubungan ini menunjukkan bahwa PKB tidak dapat berdiri sendiri dalam Pileg tanpa

dukungan dari NU, di mana NU memiliki jaringan, pengaruh, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu PKB meraih kemenangan. Sebaliknya, PKB memberikan legitimasi, dukungan finansial, dan akses ke sumber daya politik yang dibutuhkan oleh NU.

Hubungan politik kolaborasi antara DPC PKB dan PCNU terlihat dengan kehadiran tokoh-tokoh PKB di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pendampingan di berbagai kegiatan yang diadakan oleh PCNU. Selain itu anggota legislatif PKB juga memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum infrastruktur-infrastrukturnya (perbaikan atau pembangunan masjid, perbaikan atau pembangunan mushalla, perbaikan atau pembangunan TPQ dan sekolah-sekolah, pemasangan lampu gratis, dan lain sebagainya). Semua upaya yang dilakukan oleh PKB ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat NU.

Kemenangan DPC PKB di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 dengan memperoleh suara terbanyak adalah bukti adanya politik kolaborasi dari DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan yang terjalin erat dan kuat. Selain itu, ada beberapa bukti keeratan hubungan antara DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan, misalnya:

1. Kemenangan DPC PKB saat pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan yang didukung oleh PCNU Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditandai dengan perolehan suara terbanyak yang didapatkan DPC PKB di Kabupaten Pekalongan yang dibantu oleh tokoh-tokoh PCNU dan warga *nadhliyin* di Kabupaten Pekalongan. Hal ini juga dibenarkan dan diakui oleh

beberapa tokoh pengurus DPC PKB dan beberapa tokoh pengurus dari PCNU di Kabupaten Pekalongan yang menyatakan bahwa memang benar pada tahun 2024 kemarin DPC PKB menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan hal ini tentu saja tidak lepas dukungan dan peran dari PCNU serta warga *nadhliyin* di Kabupaten Pekalongan. Berikut adalah foto kemenangan DPC PKB dalam pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Pekalongan:

Gambar 1. Foto pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten pekalongan masa keanggotaan 2024 – 2029 dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan selaku tokoh elit DPC PKB Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

Gambar 2. Foto pengambilan sumpah / janji pimpinan DPRD masa keanggotaan 2024 – 2029 dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan selaku tokoh elit DPC PKB Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

2. Banyaknya tokoh kader politik DPC PKB yang berasal dari PCNU Kabupaten Pekalongan, hal ini menunjukkan bahwa para elit politik DPC PKB di Kabupaten Pekalongan tidak lupa akan asal-usul mereka yang mayoritas berasal dari pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh DPC PKB dan pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan bahwa lahirnya tokoh-tokoh elit politik DPC PKB di Kabupaten Pekalongan adalah awalnya berasal dari menjadi pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan, dan pada akhirnya mereka berpindah menduduki jabatan dan menjadi pengurus di DPC PKB Kabupaten Pekalongan.

Berikut adalah foto-foto tokoh kader politik DPC PKB yang berasal dari PCNU Kabupaten Pekalongan:

Gambar 3. Foto pelantikan pengurus GP Ansor masa khitmat 2025-2029 dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan selaku tokoh elit DPC PKB Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

Gambar 4. Foto pelantikan pengurus PC IPNU Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2026 dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan selaku tokoh elit DPC PKB Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

3. Tidak adanya konflik politik antara tokoh DPC PKB di Kabupaten Pekalongan dengan tokoh pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan, hal ini menunjukkan bahwa segenap tokoh DPC PKB dan tokoh pengurus

PCNU di Kabupaten Pekalongan terjalin hubungan yang erat dan harmonis. Hal ini sebagaimana dinyatakan langsung oleh ketua dewan tanfidziyah DPC PKB Kabupaten Pekalongan yang menyatakan bahwa tidak ada masalah atau tidak ada konflik politik antara tokoh DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan, karena DPC PKB dan PCNU Kabupaten Pekalongan mempunyai satu tujuan yakni memajukan NU dan mengisi partai PKB dengan kemenangan, sehingga tidak ada konflik politik yang terjadi antara tokoh DPC PKB di Kabupaten Pekalongan dengan tokoh pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan.

Berikut adalah foto-foto keeratan hubungan pengurus DPC PKB dengan PCNU Kabupaten Pekalongan:

Gambar 5. Foto rapat bersama antara pengurus cabang fatayat NU Kabupaten Pekalongan dengan tokoh elit DPC PKB Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

Gambar 6. Foto kegiatan hari jadi PCNU di Kabupaten Pekalongan yang dihadiri oleh segenap tokoh DPC PKB Kabupaten Pekalongan.



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

4. Adanya kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal maupun informal dari DPC PKB di Kabupaten Pekalongan yang didukung langsung oleh pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan, seperti misalnya:
 - a. Kegiatan politik, meliputi:
 - 1) Konsolidasi Partai. Rapat kerja daerah (rakerda), rapat koordinasi dengan PAC (Pengurus Anak Cabang), dan kegiatan lainnya untuk memperkuat struktur partai di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Pemenangan Pemilu. Rapat-rapat persiapan pemilu, sosialisasi visi-misi partai, dan kegiatan lainnya untuk mencapai target raihan suara di pemilu legislatif.
 - 3) Jaring Aspirasi. Menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan menyalurkan ke pemerintah.
 - b. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Program Tebar Kemanfaatan, yakni program membantu pertumbuhan UMKM, warung kelontong, dan warung kecil.

- 2) Program Keagamaan, seperti: pembacaan yasinan, tahlilan, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk memperkuat tali silaturahmi antar kader dan masyarakat.
- 3) Kegiatan Sosial, yakni pembagian sembako, pakaian dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak bencana, dan kegiatan sosial lainnya.
- 4) Kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, yakni menyebarkan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI).

Berikut adalah foto-foto kegiatan DPC PKB dan PCNU Kabupaten Pekalongan:

Gambar 7. Foto kegiatan sosial pembagian sembako oleh tokoh DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

Gambar 8. Foto halal bi halal pengurus DPC PKB dengan PCNU Kabupaten Pekalongan tahun 2025.



Sumber: Facebook DPC PKB, 2024.

Semua kegiatan-kegiatan di atas menjadi bukti bahwa adanya keeratan dan hubungan yang harmonis antara DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan, meskipun tokoh elit politik yang ada di DPP PKB dengan PBNU saat ini sedang mengalami ketegangan politik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan politik kolaborasi antara DPC PKB dengan PCNU di Kabupaten Pekalongan.

Terlihat adanya bentuk hubungan dengan tujuan yang sama dan saling menguntungkan atau politik kolaborasi yang melibatkan elit partai politik DPC PKB di Kabupaten Pekalongan dengan masyarakat *nadhliyin* di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Pola pertukaran sosial yang di dalamnya memuat dana langsung sebagai perangsang adalah pertukaran sosial model lama, hal ini dilakukan sebagai bukti untuk menunjukkan keseriusan oleh PKB agar proses pertukaran tersebut memang harus berjalan, dan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Bagi masyarakat keuntungan tersebut hanya berdampak pada

jangka pendek, sedangkan bagi elit partainya hasil dari upaya itu akan berdampak pada jangka panjang, dan bisa menunjang jenjang kariernya.

2. Pola hubungan pertukaran sosial transaksional, melibatkan nama Tenar sebagai sarana utama. Nama tenar di jadikan sebagai pemikat dengan masyarakat luas, ketenaran nama seorang elit di jadikan modal untuk jejang karier politik dari bawah. Nama seseorang elit yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas karena ia sering melibatkan diri dalam berbagai urusan-urusan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi. Keterlibatannya itu baik dalam hal pengurusan, telah menjadi modal investasi untuk memperkuat jaringan. Oleh sebab itu seorang elit yang tidak memiliki modal dana sebagai sumber mobilisasi untuk pendukungnya, tetapi ia memiliki jaringan yang luas sebagai modal utamanya, dan telah di kenal oleh banyak kalangan. Elit yang memiliki modal nama tenar adalah aktor dalam bernegosiasi dan memobilisasi agar memuluskan pertukaran sosial transaksional itu bisa berlangsung, di samping itu juga sebagai pemikat.
3. Pola hubungan pertukaran sosial, melibatkan tokoh berpengaruh. Tokoh adalah kunci untuk masuk ke dalam suatu kelompok atau ke dalam suatu masyarakat. Elit partai politik akan lebih memilih tokoh masyarakat yang berpengaruh sebagai mitra komunikasi politik. Secara sederhana tokoh masyarakat elit inilah yang menjabarkan tipologi masyarakat yang ia kenal kepada pihak elit partai politik. Baik dari segi kebutuhan masyarakat, hambatan, peluang, dan potensi masyarakat, tokoh masyarakat inilah yang

memahami itu. Elit partai politik hanya mengikuti saran dan masukan dari tokoh tersebut. Ketika kedua belah pihak sudah menemukan titik temu antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan elit partai, maka hubungan pertukaran sosial itu pun berjalan.

4. Pola hubungan pertukaran sosial, dengan pemanfaatan rapat penyerapan aspirasi, berlangsung dengan dua model. Model pertama; “rapat penyerapan aspirasi terbuka” melibatkan banyak unsur di masyarakat mulai dari perwakilan petani, pedagang kecil, buruh, unsur pemerintahan Desa, wiraswasta, dan lain sebagainya. Dalam rapat penyerapan aspirasi tersebut hanya ada dua kelompok yang berkepentingan, (1) kelompok kepentingan partai, (2) kelompok kepentingan masyarakat dari berbagai unsur tadi. Model kedua; “rapat penyerapan aspirasi tertutup”, yang terlibat di dalamnya dua kelompok kepentingan dari elit partai dan dari elit masyarakatnya saja. Pola hubungan pertukaran sosial tersebut membahas strategi penggalangan massa, dan hal apa yang bisa masyarakat dapatkan, dan elit masyarakat desa bisa dapatkan nanti. Dengan catatan tujuan utama memenangkan kepentingan elit partai terlebih dahulu baru kemudian realisasi kepentingan masyarakat luas.
5. Pola hubungan pertukaran sosial dengan pemanfaatan organisasi eksternal. Organisasi yang potensial memobilisasi massa selain dari unsur tokoh Desa, lainnya adalah peran besar dari keterlibatan pemuda anshor, IPNU, IPPNU, fatayat dan kelompok ibu-ibu muslimat. Maju tidaknya suatu Desa sangat tergantung juga dari upaya kekompakan pemuda, karena peran pemuda di

Desa adalah sebagai aktor-aktor suatu kegiatan agar kegiatan tersebut menjadi sukses, oleh sebab itu menyelipkan kepentingan elit partai politik dalam kegiatan-kegiatan pemuda anshor jauh lebih efektif ketimbang membagi-bagikan dana bantuan ke Desa, demikian pula peran tokoh ibu muslimat, tokoh ini bisa memainkan isu-isu keberpihakan kepada elit yang ia dukung.

Inilah beberapa bentuk hubungan politik kolaborasi atau saling menguntungkan yang terjadi, yang dianggap penting, yang pada intinya mempertemukan dua kelompok yang saling berkepentingan dan saling ingin mendapatkan keuntungan masing-masing dalam bingkai politik. Perilaku transaksional ini terjadi secara alamiah dan terencana dengan berbagai macam warna dan seting keadaan sosialnya. Kedua kelompok antara PKB dan PCNU ini mengharapkan hasil ujung dari upaya itu adalah akan berdampak baik pada diri kelompok mereka. PKB dapat mendapatkan kehormatan, jabatan, status sosial, di sisi lain PCNU mendapatkan kemajuan, pendapatan ekonomi, jaringan perjuangan, kenyamanan dan kepercayaan yang dititipkan pada elit partai yang sedang berkuasa.

4.2 Analisis Respon DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan terhadap ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan

Ketegangan politik yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, adanya perseteruan antara

DPP PKB dan PBNU yang telah mencapai titik kulminasi. Kedua, hubungan antara PKB dengan tokoh-tokoh PBNU yang kerap kritis terhadap Anies-Muhaimin. Ketiga, perpecahan suara NU yang menjadi basis utama PKB akibat konflik ini. Keempat, fokus PKB pada perbaikan dan bukan sekadar perebutan kekuasaan. Perseteruan PKB dan PBNU kembali muncul ke permukaan, misalnya saat DPR menyetujui pansus Angket Haji 2024. Ketegangan ini dianggap sebagai puncak dari hubungan tak harmonis antara kedua kubu. Konflik ini berpotensi memecah belah suara NU yang menjadi basis utama PKB. Pemerintah berharap PBNU dan PKB fokus pada tugas masing-masing, yaitu pembangunan keumatan dan politik, serta tidak saling intervensi. Ketegangan politik di PKB adalah kompleks, dengan perseteruan internal dan perpecahan suara NU sebagai faktor utama. Wapres mengharapkan kedua pihak dapat menyelesaikan konflik dan fokus pada tugas masing-masing. PKB juga harus terus berupaya memperkuat jaringannya di basis santri dan warga *nahdliyin*, serta tetap membuka diri bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa respon DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan terhadap ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan adalah respon positif, artinya tindakan, sikap, atau tanggapan yang menunjukkan penerimaan, persetujuan, dukungan, dan partisipasi dalam strategi pemenangan Pemilu Legislatif PKB 2024. Ini adalah bentuk reaksi yang membangun dan mendorong, menunjukkan bahwa seseorang atau masyarakat merasakan sesuatu yang baik dan ingin terus terlibat atau mendukungnya. Hal

ini sebagaimana dikatakan oleh beberapa pengurus DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan yang menyatakan bahwa kemenangan DPC PKB di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 kemarin adalah bentuk dan wujud nyata dari harmonisasi hubungan dan respon positif dari segenap warga *nahdliyin* di Kabupaten Pekalongan terhadap kepengurusan DPC PKB di Kabupaten Pekalongan, meskipun di tingkat pusat saat ini sedang terjadi ketegangan politik antara pengurus DPP PKB dengan PBNU.

Secara lebih rinci, respon positif dari DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan terhadap ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan mencakup hal-hal berikut:

1. Respon positif berupa tindakan. Terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan, segenap pengurus DPC PKB dan segenap pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan berpartisipasi dalam semua kegiatan, menyumbangkan waktu dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu juga, pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan memberikan dukungan dalam bentuk apapun demi perkembangan dan kemenangan DPC PKB di Kabupaten Pekalongan.
2. Respon positif berupa sikap. Terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan, segenap pengurus DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan saling menunjukkan rasa terima kasih, menghargai, dan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan antara satu sama lain.

3. Respon positif berupa tanggapan. Terkait strategi kemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan, segenap pengurus DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan saling memberikan pujian, memberikan umpan balik positif, dan mengungkapkan dukungan secara verbal atau tertulis kepada satu sama lain.

Respon positif sangat penting karena dapat membangun hubungan, artinya respon positif dapat mempererat hubungan antara DPC PKB dan PCNU Kabupaten Pekalongan. Respon positif ini dapat memperkuat kepercayaan yang menunjukkan bahwa orang lain menghargai dan menghormati kontribusi kita, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya respon positif terhadap strategi kemenangan PKB dalam menghadapi pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan dengan harapan agar proses berjalan lancar, jujur, dan adil, serta harapan lahirnya pemimpin yang berkualitas untuk memajukan daerah. Selain itu, respon positif juga mencakup apresiasi terhadap kesuksesan Pileg, peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, dan sikap bijak dalam menghadapi hasil pemilu. Berikut adalah beberapa aspek yang muncul dalam respon positif terhadap pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan:

1. Aspek kesuksesan pelaksanaan. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan pemilihan umum legislatif, termasuk kesuksesan panitia dalam menyelenggarakan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.

2. Aspek harapan pemimpin yang berkualitas. Banyak pihak terutama dari DPC PKB dan pengurus PCNU di Kabupaten pekalongan berharap agar pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan dapat melahirkan pemimpin yang kompeten, jujur, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah.
3. Aspek partisipasi masyarakat. Respon positif juga mencakup peran aktif masyarakat khususnya warga *nahdliyin* dalam proses pemilihan legislatif di Kabupaten pekalongan, seperti menjadi relawan, mengedukasi masyarakat, dan menyuarakan pendapat secara konstruktif.
4. Aspek sikap positif dalam menghadapi kekalahan. Segenap pengurus DPC PKB dan pengurus PCNU di Kabupaten Pekalongan siap menerima kekalahan dengan lapang dada dalam pemilihan legislatif, menghormati hasil pemilu, dan tetap kritis serta konstruktif adalah sikap yang diapresiasi dalam pemilihan legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kesuksesan DPC PKB dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat karena partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses demokrasi. Saat masyarakat Kabupaten Pekalongan aktif berpartisipasi, baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak kolektif rakyat. Partisipasi yang luas juga mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi lantaran adanya banyak mata yang mengawasi dan berkontribusi dalam proses. Dengan demikian, Pileg yang melibatkan banyak masyarakat

akan menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel dan sesuai dengan harapan warga sehingga mampu mendorong kemajuan daerah secara efektif.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif karena partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif berarti memberi mandat kuat dalam pemerintahan lokal, adapun peran kelompok masyarakat khususnya warga *nahdliyin* dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan dapat berupa kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman yang diperlukan kepada warga mengenai calon legislatif, program kerjanya, dan proses pemilihan. Kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemilihan serta menindaklanjuti potensi pelanggaran. Yang terakhir mendorong partisipasi dengan cara memberikan informasi yang jelas dan memotivasi warga untuk turut serta dalam pemilihan guna meningkatkan tingkat partisipasinya.